



Kalbar Belum Bebas Korupsi

KALBAR sedang menjadi sorotan. Bukan karena prestasi putra-putrinya yang masuk level internasional, tapi kasus korupsi. Yang masih hangat tentu saja operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

Memang dari sisi jumlah barang bukti tidaklah terlalu besar, hanya Rp 340 juta. Namun, persoalan korupsi dan suap, berapa pun nilainya tentu tetaplah korupsi. Karena ini OTT KPK, tentu akan menjadi perhatian seantero Negeri. Kita tahu, ketika KPK sudah melakukan OTT, maka akan heboh dan menjadi perhatian khalayak ramai.

OTT KPK dilakukan terhadap Suryadman Gidot pada Selasa (3/4). Ia dicokok tim penindakan KPK karena diduga menerima suap Rp 340 juta dari kontraktor swasta atas sejumlah proyek di Kabupaten Bengkayang. Suryadman Gidot yang juga ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat diduga melakukan penerimaan suap itu untuk membayar keperluan pribadinya. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam jumpa pers pengungkapan kasus dugaan suap Bupati Bengkayang di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9).

Terpisah dari kasus OTT KPK terhadap Suryadman Gidot, sebelumnya Polda Kalbar mengendus dugaan korupsi di Pemkab Bengkayang. Polda Kalbar merilis pengungkapan dan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan penyaluran dana Bantuan Khusus Desa. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang tahun 2017. Dalam rilis tersebut, pihak kepolisian juga menunjukkan sitaan uang tunai sekitar Rp 6,6 miliar lebih. Uang diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.

Selain di Bengkayang Tim koordinasi dan supervisi penindakan KPK juga sudah melakukan supervisi kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Melawi. Proyek ini diperkirakan menggunakan anggaran sekitar Rp 16 miliar. Perkara dugaan korupsi ini ditangani oleh Polda Kalimantan Barat.

Penanganan kasus ini turut melibatkan jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung. BPK memperkirakan, dugaan kerugian negara dari proyek pembangunan ini Rp 5 miliar.

Kembali ke belakang, jangan lupakan kasus dugaan gratifikasi oleh Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang sudah menetapkan Hadi Mulyono Upas, sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang terhadap pokok pikiran atau aspirasi dirinya sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 dan 2018. Dugaan kasus gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan atas pokok pikiran atau aspirasi tersangka pada tahun anggaran 2017 dan 2018 di beberapa SKPD.

Kejari Ketapang menyebutkan masih ada pihak lain yang masih dilakukan pemeriksaan. Harapan kita tentu saja Kejari Ketapang dan Kejati Kalbar tak terbang pilih. Masyarakat tentu sangat mendukung dan mengapresiasi jika ada yang terlibat dan kemudian ditetapkan jadi tersangka. Jangan hanya berhenti kepada ketua DPRD Ketapang saja.

Selanjutnya, yang masih sangat baru dan hangat adalah penetapan mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husin oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat. Tambul Husin menjadi tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan tanah pembangunan perumahan dinas untuk jajaran Pemkab Kapuas Hulu tahun 2006 dengan kerugian sebesar Rp 1,6 miliar.

Selanjutnya, kita tunggu action para penegak hukum selanjutnya, baik itu polisi, jaksa, hingga KPK untuk memberantas korupsi di Kalbar. Sebab, berkaca dari kasus-kasus di atas, Kalbar masih belum bebas dari korupsi. Rakyat pasti sangat-sangat rela jika pejabat-pejabat nakal tersebut, siapa pun dia, ditangkap jika terlibat kasus korupsi. Mengapa? Karena itu adalah uang rakyat yang harusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan justru untuk memperkaya diri atau krononinya. *